



PEMIKIRAN TOKOH FILSAFAT KOMUNIKASI
“Jurgen Habermas dan Ruang Publik di Indonesia”

Oleh: Melati Mediana Tobing

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
JAKARTA
AGUSTUS 2017

KATA PENGANTAR

Jurgen Habermas sebagai anggota generasi kedua mazhab Frankfurt mengembangkan dasar yang ditentukan Plato, Aristoteles, Newton, Kant, dan Copernicus dalam tiga ranah ilmu pengetahuan. Ia mengatakan bahwa pengetahuan terdapat dalam semua jenis dan bentuk ilmu pengetahuan. Pertama, ilmu empiris-analitis tercakup *kepentingan teknis*, yakni kemampuan untuk membuat prediksi berdasarkan hukum-hukum induktif. Kepentingan teknis merupakan ungkapan teori mengenai bagaimana rasionalitas digunakan secara tepat untuk menguasai alam bagi pemenuhan kebutuhan manusia.

Bentuk kedua adalah ilmu historis-hermeneutis yang tercakup *kepentingan praktis*, yakni kemampuan untuk menjalin hubungan-hubungan di dalam masyarakat melalui interpretasi atas realitas sosial. Kepentingan praktis merupakan ungkapan teori mengenai bagaimana rasionalitas digunakan secara pantas atau patut untuk meningkatkan integrasi sosial. Ketiga, ilmu pengetahuan reflektif tercakup *kepentingan emansipatoris*, yakni kemampuan refleksi diri untuk memahami kebebasan (otonomi) pribadi dalam keharusan-keharusan (hukum) alam atau budaya. Kepentingan emansipatoris merupakan ungkapan teori mengenai kebebasan dan pembebasan sebagai proses otonomi moral atau dekolonisasi budaya (Poespowardojo & Seran, 2015, p. 185).

Pemikiran Habermas ini oleh Prof. T.M. Soerjanto Poespowardojo (Prof Sur) dirangkum sebagai dasar metodologis untuk membedakan tiga kelompok ilmu pengetahuan berdasarkan tiga pemahaman tentang manusia (Poespowardojo & Seran, 2015, pp. 187-188, 268-271). Pemikiran Habermas sesungguhnya tidak hanya dalam filsafat ilmu namun juga dikenal dalam filsafat komunikasi melalui pemikiran kritisnya yang dirangkum dalam tulisan esai ini. Tulisan ini dimaksudkan sebagai contoh bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi yang mengambil matakuliah Etika dan Filsafat Komunikasi dalam mengerjakan tugas awalnya.

Jakarta, Agustus 2017

Penulis.

BAB I.

JURGEN HABERMAS:

DISKURSUS, ARGUMEN KRITIS DAN KONTROVERSI

1.1. Biografi dan Pokok Pemikiran Jurgen Habermas

Jurgen Habermas adalah seorang filsuf yang unggul (Goodnight dalam Anerson, 2007). Sejak pertengahan tahun 1960-an, ia mengembangkan filsafat komunikasi yang rumit, penuh elaborasi dan luas, menantang, membingungkan, frustrasi, provokasi, dan menyibukkan sekaligus menginspirasi publiknya. Ini dikarenakan “teori tindakan komunikasi” atau *communication action theory* dianggap sebagai proyek filsafat paling ambisius yang pernah ditangani.

Argumentasi Habermas bahwa filosofi membentuk modernisasi yang sesuai kepentingan keberlanjutan proyek Pencerahan itu sendiri, terlihat seperti melawan arus abad kedua puluh. Kondisi saat itu berada di tengah kolonialisme kemunafikan, penyalahgunaan revolusi industri, dan pemisahan persamaan antara teknologi dengan kemajuan moral di medan pertempuran Perang Dunia Pertama. Bahkan ketika ilmu pengetahuan kemudian jauh mulai berevolusi, yaitu dengan munculnya berbagai bentuk alat penerbitan, telepon, media dan berbagai alat perubahan, yang menjadi penanda usainya Perang Dunia Kedua.

Seperti gurunya, Theodor Adorno, Habermas tidak buta terhadap kegagalan Pencerahan; dimana filosofisnya mengakar tepat pada pengalaman abad kedua puluh¹. Lalu, atas dasar mencari alasan mengatasi “malam gelap”, ia mengembangkan filosofi tentang rekonstruksi dan perbaikan, suatu program yang meletakkan ide komunikasi pada aspek fundamental manusia.

Ide komunikasi itu bukan sesuatu yang baru, di mana lebih dari setengah abad hal tersebut tertanam dalam pengetahuan budaya modernisasi. Model dimana Claude Shannon dan Warren Weaver membayangkan komunikasi dalam sebuah bentuk standar

¹ Theodore Adorno, *Negative Dialectics* (New York: Seabury Press, 1973). See also Fred R. Dallmayr dan Thomas A McCarthy, *Understanding and Social Inquiry* (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1977); Raymond Geuss, *The Idea of Critical Theory: Habermas and the Frankfurt School* (New York: Cambridge University Press, 1981); David Held, *Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas* (Berkeley: University of California Press, 1980).

yang modern. Pengirim dan penerima mengubah sinyal menjadi pesan encoding dan decoding yang melintasi sebuah saluran dalam satu ketika, kemudian kembali lagi dalam bentuk *feedback* kepada sumber aslinya.² Seluruh proses terjadi pada lingkaran teknis yang mulus yang direduklasi oleh perilaku kimiawi, mesin, hewani, bahkan manusia. Mereka semua mengambil bagian dalam mengubah informasi. Konteks dikatakan membuat perubahan, tergantung pada saat dua manusia terlibat dalam hubungan interpersonal, dalam interaksi kelompok, atau khalayak luas dalam pesan yang dimediasi secara massal.

Model ini universal, yang diuraikan secara analitis, dijelaskan secara alamiah, statis, lengkap, dan efisien. Lebih jauh lagi, permasalahan komunikasi dapat dipastikan melalui identifikasi kelemahan, kekurangan, dan distorsi dalam encoding, transmisi, decoding, atau *feedback* – sebagaimana kekuatan komunikasi dapat diukur melalui kekuatan sinyal, ketepatan transmisi, kerasnya *feedback*, keluwesan saluran, dan kesesuaian dengan karakteristik khalayak. Ide tentang komunikasi sebagai medium netral perubahan sosial dan jaringan kontak dijalin dari masyarakat modern yang memiliki superstruktur teknologi, komersial, profesional dan keilmuan. Meskipun demikian tidak semua elemen tersebut adalah komunikasi.

Dalam merespon versi modern ilmu dan teknologi yang membentuk masyarakat tradisional, sejumlah pengarang mengangkat isu tentang alasan, etika, komunikasi dan bahasa. Di satu sisi, proyek mereka tentang dekonstruksi bersama dengan kritik keras postmodernisme yang mengoreksi keangkuhan Barat melalui pembuatan strategi antagonis, skeptis, dan minimalis, dan ajakan kembali mengambil Nietzsche, untuk kemudian mempertanyakan tentang klaim berlebihan tentang suatu ilmu dalam menjelaskan dan mempertanyakan kekuatan kelembagaan. Di sisi lain, bermunculan sejumlah proyek filosofis untuk memulihkan, memperbaiki, atau merekonstruksi hubungan yang rusak antara alasan dan komunikasi, termasuk karya John Rawls, Charles Taylor, Karl-Otto Apel, dan Albrecht Wellmer.

Proyek Habermas mempertahankan antagonisme kelompok konstruktivis, sebagaimana ia melibatkan dialektik negatif, mendekonstruksi kritiknya, strategi silsilah melalui pemberian tantangan kepada Jacques Derrida, Michel Foucault, dan lainnya

² Claude E. Shannon and Warren Weaver, *The Mathematical Theory of Communication* (Urbana: University of Illinois Press, 1949/1964).

untuk mengabaikan “kontradiksi performatif” dan membuat ruang afirmatif, bidang yang meluruskan proyek pribadinya dengan tujuan emansipasi dan keadilan. Sebagai tambahan, Habermas menyediakan, memindahkan, dan membedakan proyeknya dari praktek universal kompetitornya, melalui pembelaan filosofis universalis, Kantianism yang telah direvisi, memasuki kualitas interaksional dalam diskursus, sebagai dimensi kognitif, dan ketaatan prosedural pada bentuk universal. Proyek tersebut dibangun secara dialektikal, sebuah filosofi komunikasi tunggal dengan inti pada argumentasi, yang berlangsung melalui perjanjian argumentatif di mana pendukung dan lawannya sama.

Publikasi hasil kerja awalnya di Inggris memberikan inisiatif neo-Marxis Habermas pada kritik tentang alasan ilmu, terutama yang bertitik berat pada krisis legitimasi. Legitimasi penting bagi masyarakat demokratis, karena kapitalis memproduksi ketidaksamaan kekayaan; karenanya negara maju sejahtera kontemporer mesti secara konstan menegosiasikan kebutuhan masyarakat dengan permintaan kapital untuk memperoleh keuntungan. Krisis legitimasi terjadi ketika justifikasi tidak lagi memuaskan, dan menghasilkan ketidakpuasan yang menyebar luas. Distorsi komunikasi merupakan gejala dan juga penyebab krisis, yang dapat dibongkar dan dianalisa melalui kritik pada distorsi komunikasi politik yang tersistem.

Buku Habermas *Theory of Communication Action*, terbit dalam dua volume dan dipublikasikan pada awal tahun 1980-an, memulai ide dasarnya tentang diskursus dan kritik dengan isu “*colonization of the lifeworld*” yang disebabkan tindakan “para ahli budaya” dalam lembaga yang pemerintah. Publikasi berbahasa Inggris dalam disertasinya tahun 1989, *The Structural Transformation of the Public Sphere* (dipublikasikan pertama kali tahun 1962), membantu kita memahami idenya.

Habermas mengangkat isu bahwa demokrasi itu sendiri mengalami penurunan karena hak konstitusional paling berharga dalam kinerja kewarganegaraan dan suara informasi terkikis oleh “tontonan” yang merupakan hasil kerja media massa (mis. konfensi partai politik, liputan pacuan kuda, dll). Kemunduran tesis mematikan debat langsung yang terjadi pada ruang publik (*public sphere*).

Sebagai lanjutannya, Habermas mempublikasikan “*Between Facts and Norms*”, suatu kerja yang mengembangkan teori kritis dalam upaya mengangkat gerakan sosial dan membawa publik baru sekitar akhir Perang Dingin. Dalam kerjanya ini, hubungan komunikatif antara dan di antara gerakan pinggiran, masyarakat sosial, dan lembaga

negara dieksplorasi, sebagaimana khalayak muncul dari batas luar dengan ide yang baru dan definisi kebutuhan yang baru, dan kemudian berpadu dengan dialog dengan lembaga masyarakat sipil, yang pada gilirannya menerjemahkan protes terhadap kekuatan yang mempengaruhi.

Sebagai tambahan, Habermas meneliti fungsi argumentasi unik lembaga yudikatif, legislatif dan eksekutif dalam menerjemahkan “kekuasaan komuniatif” dalam diskursus publik menjadi “kekuasaan birokratis”, yang diperluas melalui pengadilan dan melalui aturan atau tugas yang dilegitimasi. *Between Facts and Norms* adalah buku yang sangat kuat mempengaruhi diskusi bernas yang kemudian mengambil posisi pada isu “*deliberative democracy*”, suatu debat panjang dalam prasyarat komunikasi dan argumentasi bagi keberadaan ruang publik.

Selama tahun 1990-an, Habermas melanjutkan idenya mengembangkan ide pragmatis universal, melalui teori “*discourse ethics*”, yang mengelaborasi teori utamanya “*communication action*” dan tetap menjaga asumsi dasarnya. Habermas menetapkan bahwa tantangan membangun *communication ethics* tidak hanya, atau bahkan terutama, masalah diskusi antar para filsuf.

Karenanya selama lima belas tahun **ia telah memasuki sejumlah debat publik, mempertanyakan posisi dan klaim dari sudut pandang komunikasinya sendiri.** Ia terintervensi dalam debat publik yang membahas sejarah dan *the Holocaust*, agama, teroris, hak asasi manusia, globalisasi, Uni Eropa, dan genetika. Dalam tiap kasus, Habermas menjelaskan kedua sisi dari pertanyaan, memberikan kesempatan untuk kompetisi argumentasi, sementara merekonstruksi dimensi normatif isu yang terkait dengan solusi emansipasi, komunikasi tanpa distorsi, dan keadilan. Unikny, Habermas menggabungkan teori dan praksis dalam filsafat komunikasi dalam kajian yang sangat luas.

Habermas melengkapi pemikirannya mengenai keterkaitan antara teori dan praksis atau ilmu pengetahuan dan kepentingan dengan merumuskan lima tesisnya mengenai pengetahuan-tercakup kepentingan (*knowledge-constitutive interest*) sebagai berikut: Pertama, pengetahuan-tercakup kepentingan, karena hal itu mempunyai dasarnya dalam sejarah alam semesta dan sejarah umat manusia. Teori membutuhkan praksis dan praksis memerlukan dasar teoretis. Tanpa teori, praksis dapat menjadi aksi yang sembrono sehingga tidak membawa maslahat bagi pemenuhan kebutuhan manusia.

Sebaliknya, tanpa praksis, teori tidak berpijak pada kenyataan dan mengawang menjadi verbalisme kosong. Kedua, pengetahuan-tercakup kepentingan, melampaui pemahaman empirisme atau positivisme logis yang membatasi pengetahuan hanya sebagai sarana. Pengetahuan-tercakup kepentingan meliputi: informasi, interpretasi, dan kritik (pertimbangan).

Dalam konsep pengetahuan-tercakup kepentingan, informasi yang dihimpun melalui observasi membentuk kemampuan mengontrol alam dinyatakan dalam kerja. Interpretasi atas informasi membentuk aksi komunikasi melalui bahasa. Pertimbangan (kritik) menyatakan otonomi subjek yang berpikir dapat mencapai taraf pencerahan mengenai dirinya sebagai sumber kekuasaan. Ketiga, pengetahuan-tercakup kepentingan mengambil bentuk nyata yang tak tersangkal dalam kerja, bahasa, dan kuasa. Kerja mewujudkan kepentingan ekonomi, yakni pemenuhan kebutuhan hidup dan aktualisasi diri. Bahasa mewujudkan kepentingan praktis, yakni komunikasi dengan orang lain dalam kehidupan bersama. Kekuasaan mewujudkan kepentingan emansipatoris, yakni kemampuan subjek untuk menuntut kebebasan (*otonomi*) dan pembebasan (*dekolonisasi*). Keempat, pengetahuan-tercakup kepentingan menjadi nyata dalam refleksi, yakni pencapaian pemahaman yang benar mengenai kesatuan teori dan praksis. Dalam refleksi, pemahaman mengenai pengetahuan-tercakup kepentingan menjadi nyata dalam refleksi, yakni pencapaian pemahaman yang benar mengenai kesatuan teori dan praksis. Dalam refleksi, pemahaman mengenai pengetahuan-tercakup kepentingan mencapai puncaknya dalam suatu hubungan dialektis, bahwa salah satu (teori maupun praksis) tidak bisa ada sendiri tanpa yang lain. Konsep *interest* dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin *inter* dan *esse*, yaitu bahwa kepentingan itu ada di antara dan menghubungkan dua hal, teori dan praksis. Kelima, konsep pengetahuan-tercakup kepentingan merefleksikan filsafat Sokratik atau metode filsafat Sokratik, yakni dialog sebagai usaha rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi didahului informasi tentang masalah, interpretasi, dan kritik yang memungkinkan pencerahan dan pembebasan (Poespowardojo & Seran, 2015, pp. 185-186).

Tulisan ini menjelaskan teori kritis komunikasi dari Jurgen Habermas, sebagai perjuangan dalam mengartikulasi pragmatis universal yang menjanjikan kebebasan, mereklamasi alasan, dan jalur rekonstruktif menuju Pencerahan. Tulisan terdiri atas tiga bagian: melacak asumsi inti dari komunikasi, meninjau tingkatan argumentasi, dan

diskusi terhadap kritik Habermas tentang kontroversi kontemporer. Pada bagian akhir, tulisan dilengkapi contoh implementasi ruang publik melalui berbagai kasus di Indonesia yang menjadi diskusi publik pada media sosial sekitar tahun 2015.

1.2. Teori Tindakan Komunikasi

Ide dasar mengenai komunikasi sesungguhnya sangat sederhana. Menurut Habermas, “ketika mengatakan sesuatu dalam konteks kehidupan sehari-hari, pembicara merujuk tidak hanya pada sesuatu di dunia obyektif (secara keseluruhan atau mungkin sebuah kasus), tetapi juga sesuatu di dunia sosial (sebagai keseluruhan dari hubungan interpersonal yang terlegitimasi) dan pada sesuatu yang dimiliki di dunia pembicara (sebagai keseluruhan pengalaman yang dapat dimanifestasikan dan memiliki akses atas hak istimewa).

Speech atau wicara, dikatakan sebagai ucapan dalam sebuah komunitas besar pengguna bahasa asli. Setiap pembicara disituasikan dan semua ucapan pada awalnya menjalin tiga dunia tersebut; setiap ucapan ditujukan untuk dimengerti, untuk dikomunikasikan—menghubungkan tindakan berbicara pada situasi dengan cara seperti untuk mengundang pemahaman yang membumi secara unik pada satu dari tiga dunia tersebut.

Menurut Habermas, ketiga dunia tersebut memberikan atau memperbarui hubungan-hubungan interpersonal dalam kasus di mana pembicara membuat referensi yang mengacu pada sesuatu di dunia sosial dari tatanan sosial yang terlegitimasi. Tidak hanya itu, ketiga dunia memberikan proses representasi diri dalam kasus di mana pembicara membuat referensi mengenai sesuatu di dunia subyektif, di mana ia memiliki akses atas hak istimewa. Dengan kata lain menurut Habermas, terjadinya kesepakatan (*agreement*) dalam praktek komunikasi sehari-hari terletak secara bersamaan pada intersubyektivitas yang berbagi pengetahuan yang proporsional pada kesesuaian normatif dan rasa saling percaya (Goodnight dalam Arneson, 2007 p. 95).

Ketiga dunia tersebut yang terjadi di dalam ujaran (*utterance*) menurut Habermas disebut sebagai (Habermas, 1984, p. 100):

- 1) dunia obyektif (*the objective world*), adalah totalitas atau keseluruhan dari semua entitas tentang manakah pernyataan yang benar dianggap tepat. Dunia obyektif ini

terkait dengan sistem budaya yang membentuk pemikiran kita akan suatu konsep tertentu.

- 2) dunia sosial (*social world*), adalah keseluruhan dari hubungan interpersonal yang diatur secara terlegitimasi; dan
- 3) dunia subyektif (*subjective world*), adalah keseluruhan dari pengalaman partisipan (*speaker*) dimana ia memiliki hak istimewa atas pengalaman tersebut.

Teori tiga dunia yang disebutkan Habermas tersebut, meminjam istilah tersebut dari Karl Popper yang disebutkannya di dalam bukunya *The Theory of Communicative Action* (TCA) Volume 1 (Habermas, 1984, p. 76);

Kita mungkin membedakan tiga dunia atau *universe* sebagai berikut: *pertama* adalah dunia obyek fisik atau keadaan fisik; *kedua* adalah dunia dari keadaan kesadaran atau keadaan mental atau mungkin pengaturan psikologis untuk bertindak (melakukan sesuatu); dan yang *ketiga* adalah dunia obyektif dari isi pikiran terutama pemikiran ilmiah dan puitis dan karya-karya seni.

Penjelasan tiga dunia menurut Popper untuk memahami realitas adalah sebagai berikut, pertama dunia fisik (*physical world*) yang didalamnya mencakup **semua benda fisik yang disebut sebagai dunia 1 (world 1)**. Dunia ini mencakup segala hal fisik dan biologis yang ada di alam semesta, mulai dari batu hingga bintang, binatang dan tumbuh-tumbuhan (Popper, 1978, p. 143) :

I will propose a view of the universe that recognizes at least three different but interacting sub-universes. There is, first, the world that consists of physical bodies: of stones and of stars; of plants and of animals; but also of radiation, and of other forms of physical energy. I will call this physical world 'world 1'.

If we so wish, we can subdivide the physical world 1 into the world of non-living physical objects and into the world of living things, of biological objects; though the distinction is not sharp.

Kemudian **dunia mental atau psikologis yang disebutnya sebagai dunia 2 (world 2)**. Dunia mental ini terkait dengan pikiran atau pernyataan psikologis yang dimiliki oleh manusia, termasuk mimpi atau yang disebut Popper sebagai *subconscious experience* dan banyak berbicara mengenai masalah moral (Popper, 1978, p. 142):

There is, secondly, the mental or psychological world, the world of our feelings of pain and of pleasure, of our thoughts, of our decisions, of our perceptions and our observations; in other words, the world of mental or psychological states or processes, or of subjective experiences. I will call it 'world 2'. World 2 is immensely important, especially from a human point of view or from a moral point of view. Human suffering belongs to world 2; and human suffering, especially

avoidable suffering, is the central moral problem for all those who can help.

World 2 could be subdivided in various ways. We can distinguish, if we wish, fully conscious experiences from dreams, or from subconscious experiences. Or we can distinguish human consciousness from animal consciousness.

Dunia terakhir adalah **pengetahuan sebagai produk dari akal pikiran manusia yang disebut Popper sebagai dunia 3 (world 3)**. Pada dunia ke-3 adalah dunia dimana semua produk pengetahuan yang dihasilkan dari pikiran manusia. Apakah itu berupa lukisan, lagu atau bahkan karya teknik seperti pesawat terbang (Popper, 1978, p. 143):

My main argument will be devoted to the defence of the reality of what I propose to call 'world 3'. By world 3 I mean the world of the products of the human mind, such as languages; tales and stories and religious myths; scientific conjectures or theories, and mathematical constructions; songs and symphonies; paintings and sculptures. But also aeroplanes and airports and other feats of engineering.

It would be easy to distinguish a number of different worlds within what I call world 3. We could distinguish the world of science from the world of fiction; and the world of music and the world of art from the world of engineering. For simplicity's sake I shall speak about one world 3; that is, the world of the products of the human mind.

Agak berbeda dengan Popper, Habermas dalam melihat keterkaitan antara ketiga dunia tersebut relatif otonom. Menurutnya tidak ada contoh, metode atau prosedur tunggal yang akan menghasilkan pengetahuan rasional. Setiap dunia memiliki kategori atau standarnya masing-masing dalam menilai komunikasi melalui argumen. Rasionalitas komunikatif dengan demikian mengakui adanya keluasan rentang standar validitas untuk mencakup kegiatan-kegiatan dari dunia sehari-hari. Dalam bukunya TCA Volume 1 Habermas menyebutkan bahwa meskipun ia meminjam istilah tiga dunia dari Popper, ia tidak akan bekerja dengan menggunakan terminologi Popper tersebut. Habermas mengatakan ia hanya menggunakannya untuk menyiapkan asumsi-asumsi “ontologis” untuk menjelaskan tentang konsep tindakan dalam ranah sosiologis yang spesifik (Habermas, 1984, pp. 84-85).

1.3. Tindakan Komunikasi dan Strategi Komunikasi

Sehubungan dengan komunikasi sehari-hari adalah landasan dasar dalam kehidupan di dunia ini, Habermas percaya bahwa individu secara rutin berpartisipasi dalam berbagai cara komunikasi tanpa banyak refleksi. Kata-kata seperti “*kasusnya seperti ini ya?*”,

“Berhasil nggak yaaa..”, “Sayang, haruskah kita melakukannya?”, bisa jadi adalah kata-kata yang umum dan biasanya spontan diucapkan karena dalam upaya memahami, komunikasi menyesuaikan dirinya ke dalam berbagai bentuk untuk mengakomodasi berbagai pernyataan dan respon yang berbeda-beda.

Menurut Habermas, dalam sikap untuk mencapai pemahaman, maka pembicara (speaker) hendaknya menaikkan setiap ujaran ke dalam hal yang bisa dipahami untuk menyatakan bahwa klaim tersebut adalah benar (atau setidaknya dianggap benar), bahwa tindakan bicara adalah benar dalam hal konteks normatif yang ada (atau dalam konteks normatif akan menjadi nyaman bila terlegitimasi).

Namun demikian Habermas membedakan antara tindakan komunikatif dengan tindakan strategis dan instrumental dan mencoba menunjukkan bahwa hal yang kedua (tindakan strategis dan instrumental) melekat dan tergantung (seperti parasit) pada tindakan komunikatif (Finlayson, 2005, p. 47):

Sebuah tindakan berperan ketika agen individu melakukan sesuatu sebagai sarana untuk membawa tentang akhir yang diinginkan; tindakan strategis adalah jenis tindakan instrumental yang melibatkan mendapatkan orang lain untuk melakukan hal-hal sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan sendiri seseorang. Titik penting adalah bahwa keduanya berbeda dari tindakan komunikatif.

Tindakan instrumental adalah hasil praktis penalaran instrumental, perhitungan cara terbaik untuk akhir yang diberikan. Habermas berpendapat bahwa ada dua kriteria tindakan berperan: bahwa akhir dari tindakan ditentukan terlebih dahulu (*antecedently*) dan independen dari sarana realisasinya, dan bahwa itu diwujudkan dengan intervensi kausal dalam dunia objektif. Aksi komunikatif tidak memenuhi kriteria tersebut, untuk tujuan yang melekat - pengakuan dan penerimaan dari klaim validitas - tidak dapat ditentukan secara independen dari sarana realisasinya, wicara, dan bukan sesuatu yang dapat berikan secara sebab-akibat (causal).

Sedangkan tindakan komunikatif sendiri menurut Habermas mensyaratkan bahasa sebagai media untuk mencapai pemahaman (*understanding*) selama para partisipan melalui bahasa tersebut berelasi pada dunia secara timbal balik akan menciptakan klaim validitas yang dapat diterima atau dipertentangkan satu sama lain (Habermas, 1984, p. 99). Selanjutnya ia mengatakan bahwa model tindakan komunikatif tidak menyamakan tindakan dengan komunikasi. Bahasa adalah media komunikasi yang memberikan pemahaman dimana para aktor datang dengan sebuah pemahaman satu kepada

pemahaman lainnya untuk kemudian megkoordinasikan tindakan untuk mengejar tujuan tertentu mereka (Habermas, 1984, p. 101).

Untuk mencapai konsensus dalam tindakan komunikatif agar bisa melakukan klaim atas kebenaran obyektif, Habermas memberikan analisis pada teori tindakan wicara (*speech-act theory*). Analisa tindakan wicara ini melakukan pembedaan dimensi tindakan dan efek pada tiga hal yang disebut dengan *illocutionary*, *locutionary* dan *perlocutionary*.

Tindakan wicara ini menurut Habermas, sesungguhnya adalah penafsiran pada diri sendiri (*self-interpreting*). Ketika saya melihat seseorang berjalan menyusuri jalan di depan saya, dia mungkin melarikan diri atau bergegas atau berolahraga. Biasanya, saya akan menafsirkan tindakannya dengan menganggap sikap proposisional tertentu kepadanya atas dasar perilaku atau penampilan yang tampak luar (Finlayson, 2005: 49). Hal ini berarti bahwa Habermas telah melihat bahwa berkomunikasi tidak hanya pada persoalan mengirim pesan, tapi juga pada proses penafsiran yang terjadi pada setiap individu.

Analisis Habermas tentang tindakan wicara ini dimaksudkan untuk menunjukkan tujuan ilokusi, yang pada prinsipnya terbuka untuk melihat bahwa secara teoritis dan pragmatis lebih mendasar dari tujuan perlokusi. Ia memperluas poin ini untuk tindakan instrumental dan strategis pada umumnya, dan menyimpulkan bahwa mereka menempel dan tergantung (seperti parasit) pada tindakan komunikatif, sedangkan yang kedua adalah mendasar dan lebih bebas (Finlayson, 2005, p. 50). Ketika saya mengatakan pada teman saya, “Jangan merokok”, menurut Habermas terdapat semacam ancaman untuk mengubah pemikiran teman saya dan itu dapat menghasilkan efek yang diperlukan. Akan tetapi mungkin teman tidak akan sepenuhnya dapat memahami tindakan saya sampai ia mengerti dan menerima alasan mengapa saya melarangnya merokok.

Efek ilokusi (*illocutionary effect*) ini menurut Habermas untuk mendapatkan konsensus yang dimotivasi secara rasional atau untuk mencapai tujuan akhir (misalnya teman saya memutuskan tidak merokok) dengan cara mencapai konsensus tersebut. Tujuan ilokusi dari ucapan saya kepada teman saya ini tidak hanya untuk mendapatkan agar ia tidak merokok, tetapi juga untuk mendapatkan agar ia menerima permintaan saya sebagai suatu yang sah atau wajar, dan untuk secara sukarela mematuhi itu (Finlayson, 2005: 49). Sedangkan efek perlokusi (*perlocutionary effect*), yang merupakan kebalikan dari efek ilokusi, maka pada efek perlokusi ini adalah efek tindakan wicara yang tidak

hanya mendapatkan pemahaman saja seperti pada efek ilokusi, tetapi juga ada hal yang lain. Dengan mengatakan agar teman saya tidak merokok dengan akibat yang akan menyimpannya bila hal itu tetap dilakukan, maka tindakan saya ini akan menjadi peringatan bagi teman saya atau mungkin menarik perhatiannya. Efek perlokusi bisa jadi tidak nampak atau tersembunyi, bisa menjadi efek yang baik atau buruk atau bahkan tidak keduanya (Finlayson, 2005: 49)

Ketiga efek tersebut, terutama perbedaan efek *illocutionary* dan *perlocutionary* dipinjam oleh Habermas dari seorang filsuf universitas Oxford bernama **J.L Austin** dan mengadaptasinya untuk menegaskan tujuannya mengenai pembedaan antara tindakan komunikatif dengan strategi instrumental. Menurut Habermas (dalam Habermas, 1984: 288-289), Austin membedakan tindakan lokusi (*locutionary*), ilokusi (*illocutionary*) dan perlokusi (*perlocutionary*):

Austin mengaplikasikan lokusi (*locutionary*) sebagai isi dari kalimat proposisional atau kalimat proposisional yang dinominalkan. Melalui tindakan lokusi, pembicara (*speaker*) menyatakan suatu keadaan; ia mengatakan sesuatu. Sedangkan pada tindakan ilokusi (*illocutionary*), pembicara melakukan peran yang menegaskan mode kalimat yang digunakan sebagai sebuah pernyataan, janji, perintah, sumpah atau menyukai. Di bawah kondisi yang standar, mode ini diekspresikan melalui sarana kata yang performatif pada orang pertama; makna tindakan dapat dilihat terutama melalui fakta bahwa kata “dengan ini” (*hereby*) dapat ditambahkan pada komponen ilokusi dari tindakan wicara: Dengan ini aku berjanji padamu (memerintahkamu, mengaku padamu) bahwa... Akhirnya melalui tindakan perlokusi, pembicara memproduksi efek pada pendengar. Dengan mengeluarkan tindakan wicara, seseorang memberikan sesuatu dalam dunia. Tiga tindakan yang dibedakan oleh Austin tersebut dapat dikategorikan sebagai frase: mengatakan sesuatu (*to say something*), untuk bertindak dalam mengatakan sesuatu (*to act in say something*), memberikan tentang sesuatu melalui bertindak dalam mengatakan sesuatu (*acting in saying something*).

Apa yang disebut Austin sebagai efek perlokusi datang dari fakta bahwa tindakan ilokusi tertanam dalam konteks interaksi. Tindakan wicara, sebagaimana tindakan pada umumnya dapat memproduksi efek samping yang orang (*actor*) tidak dapat meramalkannya; itu adalah efek perlokusi dalam pemahaman yang sederhana, yang tidak akan dibahas lebih jauh. Lebih sederhana adalah efek perlokusi yang dihasilkan dari fakta bahwa tindakan ilokusi seringkali mengambil peran dalam konteks interaksi yang strategis. Efek-efek tersebut kemudian terjadi setelah seorang pembicara bertindak dengan orientasi untuk sukses dan dengan demikian menginstrumentalkan tindakan wicara untuk tujuan yang hanya secara bergantung dikaitkan dengan makna dari apa yang dikatakan,

1.4. Argumentasi dan Klaim Kebenaran

Komunikasi memuat alasan – didefinisikan oleh adanya kerelaan untuk menawarkan dan menerima kritik – sebagai hal inti yang umum. Semua orang tampaknya secara intuitif memahami bagaimana mengekspresikan identitas, merencanakan berbagai kegiatan, dan mengkoordinasikan tindakan karena kita percaya bahwa komunikasi secara esensial bertujuan pada pemahaman, konsensus, kejelasan, kolaborasi yang logis. Dalam komunikasi sehari-hari, keempat klaim validitas (*truth, rightness, sincerity dan comprehensibility*) secara naif diterima oleh partisipan. Hal itu berarti kemungkinan rutinitas komunikasi tergantung dari tuduhan timbal balik yang tersirat oleh aktor-aktor sosial, bahwa yang lain adalah jelas, jujur, tulus dan berperilaku selayaknya dengan mengacu pada norma-norma sosial yang dapat diterima (Goodnight dalam Arneson, 2007, p. 96). Selanjutnya dalam memperhitungkan segala kemungkinan dari dunia kehidupan, untuk memperbaiki kerja sama dalam sebuah situasi, pembicara memiliki banyak pilihan, tidak semuanya menguatkan ikatan komunikasi dengan pendengar. Dalam hal ini, para mitra komunikasi harus ikut serta (*engage*) dalam sebuah pertukaran yang dalam hal ini memberikan alasan dan kritik –disebut sebagai berargumentasi. Argumentasi yang merupakan dan dikatakan Habermas sebagai “sebuah bentuk wicara dimana para partisipan memperdebatkan klaim validitas dan berupaya untuk mengkritisi melalui pendapat. Sebuah argumen “memiliki alasan atau dasar yang terhubung dengan cara yang sistematis dengan klaim validitas dari sebuah ekspresi problematis.

Argumentasi adalah hubungan khusus yang berbasis pada asumsi reflektif bahwa “mengadakan panduan-aturan bisa jadi salah sehingga membutuhkan peran yang simultan, yang dapat bergantian: satu untuk A yang mengikuti peran dan karenanya mencari untuk menghindari kesalahan, dan satu untuk B yang dapat secara kritis menilai panduan aturan yang diadakan oleh A. Bagi Habermas, setiap tindakan wicara secara keseluruhan dapat dikritisi sebagai hal yang tidak sempurna (*invalid*) dari tiga perspektif yaitu tidak benar (*untrue*) dari segi pernyataan yang dibuat, tidak jujur (*untruthful*) dalam sudut pandang dari ekspresi yang ditujukan oleh pembicara, dan tidak tepat (*not right*) dalam sudut pandang konteks normatif yang ada pada waktu itu (atau norma yang terlegitimasi).

Sebuah argumentasi juga bisa menjadi tidak serius bila menurut Habermas ada peserta yang tidak diijinkan untuk berpartisipasi, isu atau kontribusi ditekan, kesepakatan

atau ketidaksepakatan dimanipulasi oleh sindiran atau ancaman sanksi. Hanya ada satu kriteria regulatif utama untuk argumentasi. Jika partisipan benar-benar ingin untuk memahami satu sama lain mereka harus membuat asumsi pragmatis yang membuat mereka bisa merespon dengan mengatakan ‘ya’ atau ‘tidak’ yang dipengaruhi semata-mata oleh kekuatan dari argumentasi yang lebih baik (Goodnight dalam Arneson, 2007, p. 97). Frase ‘argumentasi yang lebih baik’ adalah pusat dari konteks berargumentasi yang merupakan konsep yang lebih terbuka. Argumentasi memberikan fokus untuk menguji klaim validitas yang pada awalnya ditingkatkan secara tersurat dalam tindakan komunikatif dan secara naif dibawa bersamanya. Pengujian membutuhkan hubungan komunikatif khusus di mana argumentasi dalam hal ini ditandai oleh sikap hipotetis yang mengambil bagian di dalamnya.

Klaim kebenaran atau klaim validitas pada saat berkomunikasi menurut Habermas haruslah transparan, dapat mengatur dirinya sendiri, dan membentuk konsensus, atau bila hal lain tak dapat dipertahankan. Pemahaman tidak dapat diraih bila tindakan wicara tidak tulus, menutup adanya diskusi, hanya menerima diri dan tidak pada orang lain, (*self-excepting*), mengabaikan yang berkompeten dan menafikan ketertarikan khalayak (Goodnight dalam Arneson, 2007, p. 98). Oleh sebab itu menurut Habermas (1984, p. 99) dalam klaim kebenaran memiliki tiga persyaratan yaitu:

- a) pernyataan yang dibuat adalah benar (*truth*);
- b) tindakan wicara (*speech act*) dianggap benar dengan menghargai konteks normatif yang ada (*rightness*).
- c) tujuan yang nyata atau tersirat dari pembicara bermakna seperti apa adanya pada saat diekspresikan (*authentic expression*)

Penjelasan mengenai fungsi dari ketiga syarat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut (Ingram, 2010: 82):

Tabel. Fungsi Ketiga Syarat Klaim Kebenaran

Klaim Validitas	Fungsi wicara dilekatkan pada	Mode Komunikasi yang Diperjelas	Domain realitas (dunia /konteks referensial)
Truth	Locutionary/ proposisional (misalnya fakta-fakta representasi)	Tindakan wicara konstatif dibuat dari sudut pandang sikap yang obyektif	Dunia eksternal dari berbagai obyek dan entitas ruang yang tidak abadi (spatiotemporal entities)
Rightness	Illocutionary/normatif (pembentukan hubungan interpersonal yang terlegitimasi)	Tindakan wicara yang regulatif dibuat dari sudut pandang sikap yang interaktif/konformatif	Dunia sosial yang dibagi dan secara intersubyektif dapat membenarkan adanya tugas, hak, norma, nilai, kepentingan, klaim dan pemahaman etik.
Sincerity	Menyingkap tujuan subyektif pembicara, hasrat, perasaan dll.	Tindakan wicara ekspresif dibuat dari sudut pandang sikap yang ekspresif	Dunia subyektif yang mengandung konsep pemahaman dari diri sendiri, pikiran-pikiran, berbagai tujuan, perasaan dan keinginan
Comprehensibilitas	(konsep awal klaim validitas, namun setelahnya akan dipindah pada persiapan kondisi		Bahasa

Dengan demikian situasi wicara yang ideal mengandaikan ketika para aktor mengambil peran dalam diskusi yang menangguk tindakan strategis, menghargai ketentuan dukungan atau pembenaran (*justification*) sebagai tawaran yang serius, dan secara timbal balik dikendalikan untuk mencapai pemahaman. Kekuatan komunikasi dalam hal ini datang dari advokasi transformasi yang kompetitif di balik posisi kata-kata ‘ya’ dan ‘tidak’ dari orang-orang yang berargumentasi ke dalam sebuah pencarian yang kooperatif untuk kebenaran (Goodnight dalam Arneson, 2007: 97).

1.5. Bahasa dan Rasionalitas Komunikatif

Penggunaan bahasa menurut Habermas akan membentuk rasionalitas komunikatif baik secara monologis dalam konteks non sosial maupun dialogis. Tabel berikut menjelaskan

konteks penggunaan bahasa dalam bentuk yang monologis maupun dialogis (Ingram, 2010, pp. 83-84):

Tabel. Konteks Penggunaan Bahasa Secara Monologis dan Dialogis.

Monologis	Dialogis
1. Epistemik a) adanya koherensi yang logis mendapatkan diantara kepercayaan yang proporsional b) percakapan fungsional dari kepercayaan yang proporsional dengan realitas c) pencapaian reflektif dari keyakinan dengan menghargai konsep (a) dan (b).	1. Discursive (Reflektif) a) akuntabilitas: kapasitas untuk mengevaluasi kepercayaan seseorang, evaluasi tujuan dan penilaian moral dengan alasan yang jelas bisa diterima oleh orang lain dalam sebuah kondisi dialog yang bersifat tanpa tekanan, inklusif dan egaliter
2. Teleologis (bertujuan) a) kemampuan untuk memformulasikan secara jelas akhir dari tindakan seseorang b) pilihan dari sarana yang efektif untuk mendapatkan hasil (alasan instrumental) c) tingkatan dan harmonisasi dari hasil akan dimaksimalkan seefektif mungkin kenyamanan secara menyeluruh (alasan keputusan-teoretis) d) menggunakan rasionalitas reflektif dan epistemic dengan menghargai konsep (a) dan (b)	2. Komunikatif a) Kemampuan untuk membentuk tindakan wicara yang dapat dipahami dan diterima untuk tujuan-tujuan interaksi tanpa tekanan yang berdasar pada pemahaman bersama (<i>mutual understanding</i>) dan/atau kesepakatan (<i>agreement</i>) b) Kemampuan untuk menghubungkan pada penerimaan klaim validitas c) Kemampuan untuk membenarkan klaim-klaim tersebut secara diskursif bila melakukan perdebatan dengan pendengar

Menurut Habermas (Ingram, 2010, pp. 83-84), bentuk-bentuk epistemik, teleologis, dan bentuk komunikatif rasionalitas memiliki akar yang berbeda. Sedangkan rasionalitas diskursif tidak memiliki akar independen tetapi terdapat fungsi-fungsi (bersifat reflektif) untuk mengintegrasikan bentuk-bentuk yang melakukan. Setiap kali bentuk dasar penalaran menghasilkan pertanyaan lebih lanjut yang memerlukan justifikasi yang lebih dalam, jawaban (pembenaran) itu menghasilkan dengan merenungkan sendiri mengacu pada bentuk-bentuk dasar penalaran lainnya. Penalaran teleologis tentang pilihan instrumental berarti bersandar pada penalaran epistemik (kesimpulan) tentang kesamaan, probabilitas, kausalitas, dll. Pada gilirannya, penalaran komunikatif tentang tindakan wicara- yang diperlukan untuk mengkoordinasikan teleologis rasional sesuai tindakan-bertumpu pada penemuan diskursif klaim validitas. Pengetahuan empiris dan tindakan teleologis tergantung pada rasionalitas diskursif dengan cara langsung kurang dari interaksi komunikatif. Meskipun refleksi diri berasal

dari dialogis (diskursif) ketika terjadi perjumpaan dengan orang lain, itu kemudian diinternalisasikan dalam refleksi diri monologis dari orang yang berpengetahuan tunggal atau aktor. Dalam hal ini, semua bentuk di atas rasionalitas mempertahankan referensi tidak langsung ke rasionalitas diskursif. Habermas juga membahas jenis estetika dan fungsional rasionalitas, yang keduanya yang dapat diasimilasikan ke empat jenis rasionalitas yang disebutkan di atas.

1.6. Argumen Sebagai Produk, Prosedur, dan Proses

Tak ada satu pun filsuf setelah Aristoteles yang menempatkan peran penting argumen dalam pemikirannya, kecuali Habermas (Anerson, 2007). Jika Aristoteles membagi terminologi argumen dalam domain kognisi keilmuan, dialektika, dan alasan retorikal, maka Habermas melihat bagaimana argumen menjadi sebuah produk, prosedur, dan proses.

1. Argumen dalam perspektif ‘produk’ dijelaskan Habermas, seperti halnya Aristoteles, adalah sebuah pengujian bobot keilmuan secara logis melalui niatan untuk melakukan klaim keabsahan (validitas) atas argumen yang dinyatakan. Dalam kaitannya dengan klaim validitas, Habermas menyoroti karakter rasional dan kognitif sehingga menghasilkan alasan yang baik (atas argumen) yang dapat juga membantu mereka dalam menghadapi kritik (Standford University, 2015)
2. Argumen dialektikal (Aristoteles) atau disebut dengan perspektif prosedural menurut Habermas, merupakan usaha atau niat mengakhiri perselisihan atas sebuah hipotesis yang mengandung klaim validitas dengan menggunakan kesepakatan rasional. Pengujiannya dilakukan dalam suatu bentuk tindakan komunikasi dalam hubungan interpersonal. Dengan demikian, konsensus diperoleh melalui diskusi rasional di antara rekan sejawat (Agger, 2006, p. 94).
3. Alasan retorikal menurut Aristoteles, adalah bagian yang fundamental yang menghubungkan argumentasi dengan niatan untuk membuktikannya di hadapan khalayak luas. Ini yang oleh Habermas disebut dengan ‘argumen sebagai proses’. Persuasi (sebagai salah satu bentuk tindakan komunikasi) sangat dipentingkan untuk meyakinkan khalayak dalam dunia obyektif namun tetap terikat secara moral dan etika. Namun sering kali, pembuktian ini mengalami kemandekan juga karena masalah-masalah etika, seperti soal rendahnya kepercayaan, yang memicu timbulnya

keinginan menguji ulang keabsahannya, tapi justru ‘memelihara’ komunikasi di antara mereka.

Perbedaan mendasar tentang keabsahan, sebenarnya terletak pada apa yang harus hadir dalam terminologi ‘*grounds*’/lingkup dan ‘*reasons*’/alasan. Lingkup argumen teoritikal maupun argumen praktis membutuhkan pembuktian secara public dan idealnya menggunakan alat uji yang simetris, dijabarkan, dan terbuka peluang untuk ditelaah di antara teman sejawat. Dalam mengkritik, alasan-alasan juga membutuhkan pengujian secara publik, namun bersifat asimetris dalam memahami kebenaran sebuah klaim. Dari kedua poin tersebut, dapat diindikasikan apakah suatu argumen dikategorikan sebagai diskursus teoritis, ataukah diskursus praktis, ataukah sekedar kritik.

‘Diskursus’ dalam terminologi Habermas, adalah suatu arena mempertahankan argumen secara teoritis maupun praktis. Diskursus teoritis adalah panduan untuk memahami kehidupan melalui ilmu alam, yang menekankan pada ‘pernyataan hubungan-hubungan’ (*state-of affairs*) dan membutuhkan pengujian yang sesuai, dan terbuka kemungkinan untuk memanipulasi kondisi dunia. Diskursus teoritis ini bergantung pada validitas standar, dan dikonstruksikan berdasarkan ‘pemahaman inter-subyektivitas’ yang mendalam. Tindakan komunikasi yang dilakukan atas nama diskursus teoritis ini bertujuan untuk menyatakan, menegaskan, menggambarkan, atau memberikan referensi dunia yang obyektif dan memberikan jawaban hanya sejauh pembicara dan pendengar setuju untuk mendasarkan tindakan mereka pada definisi situasional yang tidak bertentangan dengan proposisi mereka. Untuk kemudian menerima jawaban tersebut dijadikan sebagai klaim kebenaran pada suatu titik tertentu. Dari sinilah kemudian terbentuk pengetahuan teknis berdasarkan pemahaman yang mendalam secara intersubyektif. Diskursus ini mengacu pada instrumen atau tujuan rasionalitas yang logis dan terstruktur untuk menjawab pertanyaan mendasar secara efektif. Formulasinya adalah dengan memanipulasi dunia alamiah, standarisasi prosedur untuk menguji bukti-bukti yang ada, dan keterbukaan untuk dikritik.

Jika fokus diskursus teoritis adalah pada ‘apa kasusnya’ maka diskursus praktis menekankan pada ‘apa yang seharusnya’. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan dalam suatu kondisi tertentu? Oleh karena itu, karakteristik tindakan komunikasi dalam diskursus praktis lebih bersifat regulatif, pernyataan-pernyataan yang mengarahkan, memungkinkan, memperingatkan, atau menunjukan bentuk komunikasi yang ‘boleh’

atau ‘tidak boleh’ dalam situasi tertentu. Maka jika diskursus teoritis lebih bersifat positivis, maka diskursus praktis lebih mengacu konstruksi dialektis dengan tujuan akhir emansipatoris, dan memberikan rekomendasi solusi tentang ‘apa yang boleh dilakukan’ dalam suatu norma yang universal.

Dalam konsepsi dasar tentang interaksi, keterikatan hubungan didasarkan pada kepentingan pribadi. Mereka yang melakukan interaksi dalam pola asimetris umumnya berada dalam kedudukan yang ‘mampu’ memberikan hukuman, sanksi, maupun penghargaan dan membatasi komunikasi hanya dalam bentuk ‘perintah’ yang menuntut ketaatan. Dalam interaksi dengan rekan sejawat, sejatinya hal ini tidak terjadi, karena hubungan didasarkan pada pola perilaku yang diinternalisasikan dari hasil pengamatan dan partisipasi dalam kehidupan sosial. Konformitas peran sangat diharapkan dan diterapkan dalam proses sosialisasi yang menyatukan identitas individu dalam pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma kelompok.

Dalam era modern, terjadi apa yang disebut dengan interaksi paska konvensional. Di mana pengambilan peran idealnya ditunjukkan dalam diskursus yang mengintegrasikan para pembicara dalam lingkup yang sangat luas dengan perspektif dunia. Dari sini, muncul aturan untuk menguji norma-norma baru yang juga berdasarkan pada prinsip-prinsip argumentasi. Rekanan akan berdebat tentang apa yang tepat, yang juga berdasarkan atas azas kepentingan pribadi, sanksi kelompok, atau kebiasaan pribadi. Validitas diuji melalui debat argumentatif yang mempertimbangkan tentang apa yang tepat untuk dilakukan dan bagaimana prosedurnya. Argumentasi kritis muncul dengan memperdebatkan tentang ‘apakah ini tepat untuk kita’ versus ‘apakah ini tepat untuk semuanya dan menjawab situasi yang ada’. Dengan demikian, ada kewajiban untuk mengedepankan akuntabilitas, bertindak atas nama kesepakatan rasional, yang ditujukan untuk kepentingan bersama. Sehingga tindakan moral yang diambil merupakan cerminan hati nurani. Selanjutnya alasan interpersonal juga dikonstruksikan secara dialektis melalui sarana ‘pemberian alasan’ antara mereka yang berwenang dan tidak berwenang dalam setiap ‘pengambilan peran’ dan menjadikannya bentuk tindakan berdasarkan pertimbangan moral dan hati nurani tersebut.

‘Kritik’ adalah bentuk argumentasi yang berbeda dengan diskursus, namun tetap memiliki nilai kebenaran. Dalam retorika versi Aristoteles, diskursus merupakan bentuk deliberasi publik yang mengandung norma-norma, dihasilkan melalui dialektika,

disituasikan sebagai retorika untuk mengatur eksese dan kurangnya ruang publik. Dalam versi Habermas, argumentasi justru dijadikan praktek deliberasi yang mempertimbangkan nilai-nilai individu maupun komunal, di mana di dalamnya terkandung elemen persuasi sebagai bentuk kritik, dan inilah bentuk proses adu argumen individu maupun komunitas.

Jadi bertentangan dengan pandangan penganut Aristoteles, Habermas justru berpegang pada deliberasi yang belum tentu menghasilkan kemauan baik dari semua anggota komunitas. Maka sejatinya berbagai kepentingan dan kebutuhan sejatinya dapat dikomunikasikan dalam debat-debat di ruang publik. Dengan demikian, argumen yang *deliberative* setidaknya memenuhi dua fungsi berbeda dalam;

1. Diskursus, yang menghasilkan alasan-alasan dengan tujuan akhir untuk mencapai keadilan dan diatur dalam prosedur yang menjamin kejujuran, dan rekonstruksi fakta-fakta yang (mungkin) saling bertentangan.
2. Kritik, ditujukan pada arena deliberasi dan menghilangkan segala bentuk kemunafikan, inkonsistensi, dan tradisi lama untuk mencapai nilai-nilai bersama, tujuan, dan cita-cita komunitas. Dengan demikian, kritik tetap harus melihat situasi yang ada, aturan yang berlaku (dalam suatu komunitas) yang sesungguhnya terefleksi dalam identitas individunya.

Maka pada intinya, klaim validitas sejatinya memang dijelaskan dengan teori argumentasi sehingga memiliki nilai kebenaran bagi setiap orang. Namun logika argumentasi sebenarnya tidak merujuk pada kaitan deduktif antar unit-unit semantik (kalimat) sebagaimana logika (toeritis) formal, melainkan pada kaitan non-deduktif antar unit-unit pragmatis (tindak bertutur) yang memang membentuk argumen. Dalam prakteknya argumentasi dapat menempati kategori tipe berikut menurut kepentingannya:

Tabel. Praktek Argumentasi Empat Kategori Tipe Menurut Kepentingannya.

Bentuk Argumentasi \ Dimensi Referensi	Eksprei-ekspresi Problematis	Klaim Validitas Yang Kontroversial
Diskursus teoritis	Kognitif-instrumental	Kebenaran proposisi; efektifitas tindakan teologis
Diskursus politik	Moral-praktis	Ketepatan norma-norma tindakan

Kritik estetika	Evaluatif	Kelayakan standar nilai
Kritik terapis	Ekspresif	Kebenaran atau kejujuran ekspresi
Diskursus Eksplikatif	-	Keterpahaman atau kesempurnaan bentuk konstruksi simbolis

(Habermas, 2006, pp. 29-30)

BAB 2.

TEORI KRITIS KOMUNIKASI DAN KONTROVERSI

Kajian teori kritis, menurut Habermas, di masa sekarang ini menghadapi banyak tantangan untuk: tetap berdiri mempertahankan segi filosofisnya, atau menjadi pendekatan pada suatu isu besar dengan menyeimbangkan kritik dan melakukan rekonstruksi atas isu tersebut. Sehingga tujuan filosofi kritis dalam komunikasi sudah sewajarnya dibentuk kembali, diperluas, dan membangun kembali kepercayaan atas idealismenya untuk menahan pandangan Barat yang cenderung kacau dan cenderung menyederhanakan. Revolusi globalisasi dengan ledakan jumlah penduduk dan kemajuan teknologi seharusnya bisa dimanfaatkan karena membuka peluang besar pada teori kritis untuk memperbaharui misi Pencerahan (*Enlightment*) dan mengakselerasikannya dengan kehidupan dunia sekarang ini. Menurut Habermas, masih ada tugas modernisasi yang harus diselesaikan. Masyarakat harus ‘didewasakan’ melalui emansipasi.

Habermas melihat bagaimana di masa teknologi maju sekarang ini masalah yang dihadapi adalah ‘hilangnya pemahaman’. Dan dari semua keriuhan modernisasi tersebut, yang tersulit adalah mengubah ‘konsekuensi mental’ agar sesuai dengan keadaan dunia yang dihadapi. Menurutnya, kemajuan teknologi dan globalisasi yang mengiringi kemajuan tersebut juga akan mendorong munculnya ‘bentuk kesadaran baru’. Oleh karena itu, alih-alih meributkan kontroversi karena kemajuan yang terjadi, ia menganjurkan untuk menguji dua sisi argumen (diskursus dan kritik) dan menyusun program untuk penyesuaian, pembaruan, atau bahkan renovasi yang radikal, ketimbang gambar-gembar mengkritisi di sana-sini namun tidak bernas, terutama pada tiga hal penting yang mengundang banyak kontroversi: globalisasi, hak azasi manusia, dan kehidupan dunia. Ini lah yang disebut sebagai ide ‘mendewasakan manusia’, menurut Habermas. Maka, ide memanfaatkan diskursus di ruang publik adalah salah satu jawabannya.

Berikut adalah kritik Habermas pada modernisasi yang sudah terlanjur berjalan;

1. Pada tingkatan kehidupan berbangsa, Habermas juga mengamati globalisasi dengan melihat ‘pertumbuhan reaksi (kelompok) etnosentris *versus* apapun yang berasal dari luar negeri’ (yang dapat menembus batas-batas Negara). Ketika kedaulatan Negara

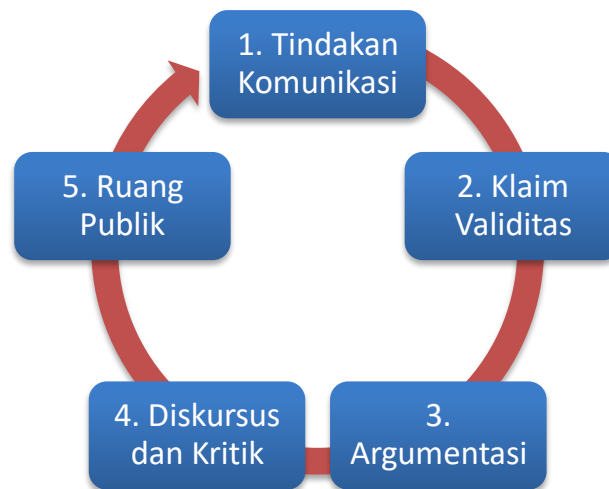
terancam, konstitusi harus menjadi poin krusial dalam pertarungan tersebut untuk tetap dapat mempertahankan jerih payah warga Negara dalam hak dan kebebasannya. Namun tantangan terbesarnya adalah, bagaimana mengefektifkan pasar dan melakukan inovasi dalam pasar bebas, namun di satu sisi tetap menghindari pola-pola distribusi yang tidak seimbang (dalam masyarakat kapitalis yang semakin beragam).

2. Habermas juga melakukan kritik pada isu tentang hak azasi manusia yang menurutnya hanya 'janji palsu' untuk menutupi bentuk eksploitasi (baru) dan rasionalisasi kosong dalam kekuatan pasar. Rekonstruksi kritis pada poin hak azasi manusia seharusnya disebarkan dan menghasilkan tindakan nyata untuk 'memotong' praktek eksploitasi. Oleh karena itu, penting adanya ruang publik yang lebih sensitive pada kebutuhan manusia dan melawan bentuk-bentuk penindasan.
3. Habermas juga membangun intervensi pandangan kritis pada kehidupan dunia (*lifeworld*). Dimana menurutnya keterbukaan praktis komunikasi sesungguhnya sudah dihabisi dalam institusi modern yang diatur oleh para ahli-ahli budaya. Para spesialis di institusi, atas nama alasan teknis, bukan saja melakukan efisiensi namun secara implisit melakukan justifikasi untuk menjaga kekuasaan dan uangnya. Yang terjadi kemudian adalah 'kolonisasi dalam kehidupan dunia'. Di mana birokrasi justru meneruskan dialektika yang terjadi selama ini. Dan mengisolasi ilmu, moral, seni, dan budaya individu-individu di dalamnya. Filosofi komunikasi kritis juga dapat melakukan pemotongan pasar-birokrasi-kolaborasi keilmuan dan menjabarkannya dalam pertanyaan-pertanyaan diskusi tentang nilai manusia dan keadilan dalam kehidupan yang baik. Di sini Habermas menggambarkan bagaimana kesadaran diri harus bertransformasi untuk 'mencapai kesepahaman' dengan membangun tradisi keagamaan menuju sekuleritas, memasuki ranah argumentatif menjadi informatif, bermakna, dan mengolaborasikan pilihan kehidupan.

Globalisasi, hak azasi manusia, dan dunia kehidupan adalah dimensi utama yang memang banyak mengundang kontroversi berbagai bidang sepanjang era modernisasi. Sehingga banyak memunculkan penjelasan, penilaian, prediksi, hingga advokasi pada ketiga elemen tersebut. Habermas dalam teori tindakan komunikasinya menciptakan sebuah oase untuk menampung debat yang kompleks atas dimensi-dimensi tersebut. Terutama ketika norma-norma sudah banyak berubah, teknologi bertumbuh (dengan

cepat), publik menunjukkan eksistensinya, Negara-negara berebut kekuasaan, dan institusi-institusi berkembang. Filsafat komunikasi harusnya mampu menggali perubahan dunia sosial, budaya, dan individu yang terus bergerak dan mengejawantahkannya dalam pemikiran-pemikiran baru, sehingga pada akhirnya dapat menjadi solusi dalam praktis Negara.

Dari berbagai penjelasan yang telah dijabarkan tentang pokok pikiran Habermas, berikut adalah gambaran kesimpulannya:



Gambar. Alur Pokok Pikiran Habermas

BAB 3.

RUANG PUBLIK DAN SEJUMLAH KASUS DI INDONESIA

Pada bagian akhir, ruang publik adalah konsep yang diperkenalkan oleh Habermas. Menurutny, ruang publik adalah suatu diskursus yang memungkinkan debat-debat dan pengemukakan pendapat terjadi dalam kondisi kesetaraan. Habermas menggambarkan bahwa ruang ini meliputi infrastruktur nyata dan norma-norma yang mendukung dan memungkinkan kritik-kritik politik diperbincangkan. Di mana panduannya adalah argumentasi rasional dan diskusi kritis yang menjadikan kekuatan argumen menjadi lebih penting dibandingkan identitas si pembicara (Habermas, 2007).

Ruang publik terbentuk seiring dengan munculnya kapitalisme-uang dan kapitalisme-niaga awal (*early finance and trade capitalism*), di mana saudagar-saudagar membutuhkan pertukaran informasi dan berita-berita yang dipublikasikan. Istilah ‘publik’ sebenarnya secara sempit sinonim dengan ‘apa pun yang terkait dengan negara’. Sejalan perkembangannya, manusia-manusia privat di bawahnya sebagai sasaran tembak otoritas publik tersebut, merekalah yang sebenarnya membentuk publik (Habermas, 2010). Habermas menyatakan bahwa ruang publik terbentuk pada kelompok-kelompok borjuis di arena-arena pertemuan di antara mereka, seperti klub-klub atau salon-salon pada masa itu. Dalam ruang publik, di mana deliberasi dalam pertukaran argumentasi sangat dipentingkan, terbentuklah apa yang disebutnya sebagai opini publik.

Lebih lanjut menurut Habermas, di dalam model liberal ruang publik, media massa memainkan peranan penting dalam menginformasikan dan memandu opini publik, terutama sejak masyarakat secara simultan mulai menghilangkan batas-batas gender/kelas/ras namun justru menjadikan komunikasi secara langsung di antara para konstituen menjadi sulit. Tapi di lain sisi, komersialisasi media massa, menjadikan ruang publik sebagai area retorika dan misi-misi *public relations* dan periklanan yang justru diprioritaskan. Kepentingan komersial, kapitalisasi ekonomi, dan *mainstream* media berisikan ruang publik penuh kompromi serta wacana publik yang terkolonisasi, dengan televisi sebagai garda terdepan (Habermas dalam Papacharissi, 2010, p. 116).

Deliberasi hubungan publik dalam ruang publik menjadi tertunda ketika masyarakat ingin mengekspresikan persetujuan maupun ketidaksetujuannya karena

media sering kali membingkai isu-isu politik yang memang menjadi prioritas, ketimbang mendorong deliberasi rasional tersebut. Riset membuktikan bahwa hal tersebut menyebabkan terjadinya mis-informasi tentang isu-isu politik penting, yang pada akhirnya menimbulkan skeptisme dari masyarakat (Fallows, 1996; Patterson, 1993 dalam Papacharissi, 2010, p. 117).

Sebuah contoh kasus di Indonesia menjadi salah satu perwujudan munculnya ruang publik di media baru. Paradoksal media ditunjukkan dengan sikap sinisme yang diwujudkan dalam bentuk parodi banyak muncul di media sosial dan menjadi bentuk pemaknaan baru dalam komunikasi. Kecenderungan pengguna media sosial memanfaatkan media baru sebagai alat untuk memparodikan sebuah issue/pemberitaan sudah dapat dirasakan sejak kampanye pemilihan Presiden 2014. Pergerakan pesan-pesan yang dikirimkan melalui media sosial saat itu sudah mulai menunjukkan gejala paradoksal antar pendukung kandidat Presiden. Misalnya setelah Debat Publik ditayangkan di televisi, maka di media sosial akan beredar hal-hal yang memanaskan di forum tersebut dalam bentuk parodi. Polemik yang terjadi di ruang publik menunjukkan dinamika paradoks di Indonesia menjadi bagian dari berita dan issue yang dibangun oleh media massa. Paradoksal melalui media sosial bisa dikatakan sebagai imitasi kehidupan di dunia maya, dunia media massa yang berjarak dengan dunia nyata. Disosiasi komunikasi yang terjadi antara pengguna media sosial juga dapat meruncing disebabkan hal tersebut. Humor yang disebarakan dianggap tidak lucu bagi pihak yang berseberangan sikap.

Banjir tagar (#) adalah salah satu bentuk partisipasi publik dalam sebuah topik yang awalnya adalah bahasan utama media *mainstream*. Semakin banyak tagar yang dikomentari, semakin besar kemungkinan topik tersebut diminati. Respon yang ditunjukkan meliputi bentuk positif maupun negatif, dalam berbagai komentar, gambar, audio-visual yang pro dan kontra. Terlepas dari apa pun berita atas topik yang ditulis media pada awalnya, reaksi yang muncul selalu di luar dugaan. Dunia digital *online* adalah media yang privat. Ia dapat menembus wilayah-wilayah yang hanya dapat dimasuki oleh si pengguna sendiri. Namun secara bersamaan, dalam suatu isu politik, media *online* seperti koin mata uang yang menghadirkan privasi dan publikasi secara bersamaan. Ia ruang publik virtual yang paling diminati saat ini. Pengguna tanpa perlu menampilkan status sosialnya dapat bersama-sama dan timbal balik menyampaikan

pendapatnya. Media bukan saja merupakan infrastruktur, tapi lebih dari pada itu ia merupakan sarana elaborasi pemikirannya dengan sudut pandangnya masing-masing.

Pengguna media sosial merupakan agen ‘perkasa’ karena tidak selalu setuju dengan isi media massa konvensional maupun pihak yang bersengketa, misalnya. Pengguna dapat memilih sendiri isu politik yang sesuai dengan minatnya. Sebuah isu yang menjadi *trending topic* bisa bertahan hingga waktu lama, bahkan ketika isu itu sendiri sudah tidak lagi menjadi prioritas bagi media konvensional. Ketika media konvensional tidak lagi mampu menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya kepada para pengambil keputusan, maka media virtual-lah yang justru mampu mengakomodir kegelisahan tersebut.

Hal ini membuktikan bahwa teknologi *digital* memungkinkan adanya suatu area terbuka, yang aksesibilitasnya secara publik maupun privat, ketimbang sekedar ruang publik konvensional. Area ini mengakomodir berbagai bentuk publisitas maupun privasi, dan menggabungkan kepentingan pribadi dan kepentingan publik secara bersamaan. Ruang publik dan privat bukan lagi merupakan wilayah yang bertolak belakang, namun telah direpresentasikan karena adanya konvergensi teknologi (Papacharissi, 2010). Namun sayangnya partisipasi yang ditujukan *netizen* selama periode Februari - Maret 2015 sangat tinggi secara kuantitas, namun rendah secara kualitas. Dua tagar yang menjadi topik utama pada periode tersebut adalah #SaveHajiLulung dan #KoinUntukAustralia.

Abraham Lunggana, Wakil Ketua DPRD Jakarta yang saat itu berseteru dengan Basuki Tjahaja Purnama (Gubernur DKI Jakarta) dijadikan bahan kicauan oleh para netizen. Kedua belah pihak mengeluarkan kalimat-kalimat yang penuh dengan sindiran, kecaman dan amarah. Munculnya tagar ini, terkait menyebarnya video dengan umpatan/makian ke Gubernur DKI pada saat akhir rapat mediasi. Hampir serupa dengan tagar sebelumnya, #savehajilulung meskipun bernilai positif, tapi seluruh kicauan dan foto/karikatur yang ditampilkan bernada sinis dan negatif. Kondisi sebenarnya bukan menyelamatkan Haji Lulung, namun justru memarjinalkannya. Alih-alih menghasilkan sebuah tindakan penegakan hukum atau kebijakan populis, pihak yang dicemooh (Haji Lulung) justru makin terkenal. Ia bahkan diundang ke berbagai stasiun televisi untuk melayani sesi wawancara yang justru bukan membahas masalah yang menyebabkan

perseteruannya dengan Gubernur DKI Jakarta (Basuki Tjahaja Purnama), namun justru membahas tentang banjir tagar tersebut.



(Solo Pos, n.d.)



(<http://humorterkini.com>, 2015)



Gambar. Kasus Perbincangan di Ruang Publik dalam Tagar Media Sosial
#SaveHajiLulung dan #KoinUntukAustralia.

Sementara untuk kasus KoinUntukAustralia, permasalahan sebenarnya adalah tentang kontroversi eksekusi mati Bandar narkoba yang berkewarganegaraan Australia –dikenal dengan istilah *Bali Nine*, namun tagar yang muncul adalah #KoinUntukAustralia. Hal ini menunjukkan bahwa isu telah bergeser dari topik utamanya. Perdana Menteri Australia bukan saja menjadi olok-olok di Indonesia, tapi juga di negaranya sendiri melalui media sosial. Besarnya partisipan tagar tersebut pada akhirnya memang tidak menghasilkan bentuk kebijakan apapun selain mewarnai perjalanan kasus *Bali Nine* tersebut.

Paradoksal media baru meliputi lima hal yang dinyatakan oleh Papacharissi: munculnya budaya dan identitas berjejaring, kemunculan bentuk narsistik baru, lahirnya kembali satire dan subversi, kolaborasi dan agnosistik pluralitas yang ditawarkan media *digital*. Seyogyanya kelima hal tersebut secara bersamaan terjadi pada para pengguna media sosial dalam menanggapi isu-isu hangat yang beredar. Budaya dan identitas dengan jejaring memungkinkan sebuah isu bagaikan bola salju yang semakin besar dalam perjalanannya. Pengguna media sosial dapat dengan mudah membagi dan menambah lagi reaksinya pada sebuah isu yang diangkat. Dalam tagar SaveHajiLulung saja ditemukan 427.000 berita, gambar rekayasa bernada satir dan subversive, maupun tautan lainnya.

Eksistensi pengguna media sosial ditunjukkan dalam partisipasinya merekayasa terus tagar tersebut.

Meskipun belum dapat memberikan solusi alternative bagi masalah yang sedang terjadi, partisipasi netizen bisa jadi merupakan bentuk ‘perlawanan’ atas konten media konvensional yang *mainstream* dan sarat kepentingan. Partisipasi dalam bentuk banjir tagar itu juga menjadi sebuah ‘kritik’ pada lembaga legislatif yang dianggap tidak memberikan jawaban dan layanan yang diharapkan publik. Namun alih-alih mengambil langkah perbaikan, pihak yang dijadikan ‘obyek’ justru terus melenggang dan menganggap kicauan hanyalah gurauan bukan sebuah dorongan untuk memberikan solusi dan perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agger, B. (2006). *Critical Social Theories: An Introduction* (2nd ed.). London: Paradigm Publisher.
- Anggie, H. (2015). *Tessa Kaunang: Sandy Tumiwa Kurang Cerdas*. Artikel daring. <http://showbiz.liputan6.com/read/2376819/tessa-kaunang-sandy-tumiwa-kurang-cerdas> diakses 28/11/2015
- Finlayson, G. (2005). *Habermas: A Very Short Introduction*.
- Goodnight, G. T. (2007). *The Engagement of Communication: Jurgen Habermas on Discourse, Critical Reason, and Controversy*. In P. Arneson, *Perspective on Philosophy of Communication*. Indiana: Purdue University Press.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society*. Boston: Beacon Press.
- Habermas, J. (2006). *Teori Tindakan Komunikatif I: Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat*. (Nurhadi, Trans.) Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Habermas, J. (2007). *Modernity: An Unfinished Project* (1980). In C. Calhoun, J. Gerteis, J. Moody, S. Pfaff, & I. Virk, *Contemporary Sociological Theory* (p. 360). Malden: Blackwell Publishing.
- Habermas, J. (2010). *Ruang Publik, Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis (terj.)*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Ingram, D. (2010). *Habermas: Introduction and Analysis*. Ithaca: Cornell University Press.
- Kompas.com (2015). Benarkah Ada Upaya Menyuap MKD Rp 27 Miliar dalam Kasus Setya Novanto. Artikel daring. <http://nasional.kompas.com/read/2015/11/26/16571421/Benarkah.Ada.Upaya.Menyuap.MKD.Rp.27.Miliar.dalam.Kasus.Setya.Novanto>.
- Popper, K. (1978). *Three Worlds. The Tanner Lecture on Human Values. Kuliah umum diberikan di Universitas Michigan*.
- Papacharissi, Z. A. (2010). *A Private Sphere, Democracy In A Digital Age*. USA: Polity Press.
- Solo Pos. (n.d.). Retrieved Desember 1, 2015, from <http://www.solopos.com/http://www.solopos.com/2015/03/07/savehajilulung-ini-kumpulan-meme-lucu-hajilulung-582786>
- (2015, Maret 8). Retrieved Desember 1, 2015, from <http://humorterkini.com/http://humorterkini.com/2015/03/08/mati-ketawa-ala-hajilulungsavehajilulungsavehajilulungsave-haji-lulungmeme-savehajilulunghaji-lulung-lucumeme-haji-lulungjoke-haji-lulung/>
- Poespowardojo, T., & Seran, A. (2015). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.